



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/754/B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Pengantar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Nomor: 800.1.2.1/1941/1.02/X/2024, Penyampaian Rekapitulasi ABK, Peta ANJAB dan Peta Evjab pada RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2024, Tanggal 4 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/739/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 5 - 11 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/754/B.07/HK/2024
 TANGGAL: 5-11-2024

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA	1	1.264	1	0	A		
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1	1.472	1	0	A	3.368	A
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1	1.104	1	0	A		
4	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	5.244	5	-5	A		
5	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	4.506	5	-4	A		
6	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	4.045	4	-4	A		
7	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	11.616	12	-12	A		
8	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	1.472	1	0	A		
9	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	4.8	5	-5	A		
10	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.543	2	-2	A		
11	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	1	1.245	1	0	A		
12	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2.614	3	-3	A		
13	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.873	3	-3	A		
14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.714	2	-2	A		
15	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0.948	1	-1	B		
16	KEPALA SUB BAGIAN ASET DAN SARANA PRASARANA	1	1.138	1	0	A		
17	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	3.546	4	-4	A		
18	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.712	4	-4	A		
19	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	6.115	6	-6	A		
20	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	4.44	4	-4	A		
21	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.152	1	-1	A		
22	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.528	4	-4	A		
23	KEPALA BIDANG PELAYANAN	1	1.308	1	0	A	2.972	A
24	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK	1	1.368	1	0	A		
25	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	5.044	5	-1	A		
26	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	2.492	2	-1	A		
27	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	1	1.169	1	0	A		
28	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4.544	5	-3	A		
29	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	0	3.214	3	-3	A		
30	KEPALA BIDANG PENUNJANG	1	1.317	1	0	A	2.796	A
31	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK	1	1.069	1	0	A		
32	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	5.044	5	-4	A		
33	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	3.397	3	-2	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.57	2	-2	A		
35	KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK	0	1.119	1	-1	A		
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	4.562	5	-5	A		
37	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	1	1.848	2	-1	A		
38	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	0	4.176	4	-4	A		
39	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.376	2	-2	A		
40	KEPALA BIDANG PROGRAM, HUKUM DAN INFORMASI	1	1.319	1	0	A	3.181	A
41	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	1	1.355	1	0	A		
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	4.562	5	-5	A		
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3.807	4	-4	A		
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	4.479	4	-4	A		
45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.528	4	-4	A		
46	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0.948	1	-1	B		
47	KEPALA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI	1	1.153	1	0	A		
48	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	0	5.541	6	-6	A		
49	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	5.198	5	-4	A		
50	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	3.707	4	-4	A		
51	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	0.716	1	-1	C		
Jumlah		26	152.021	152	-126		2.98039	A

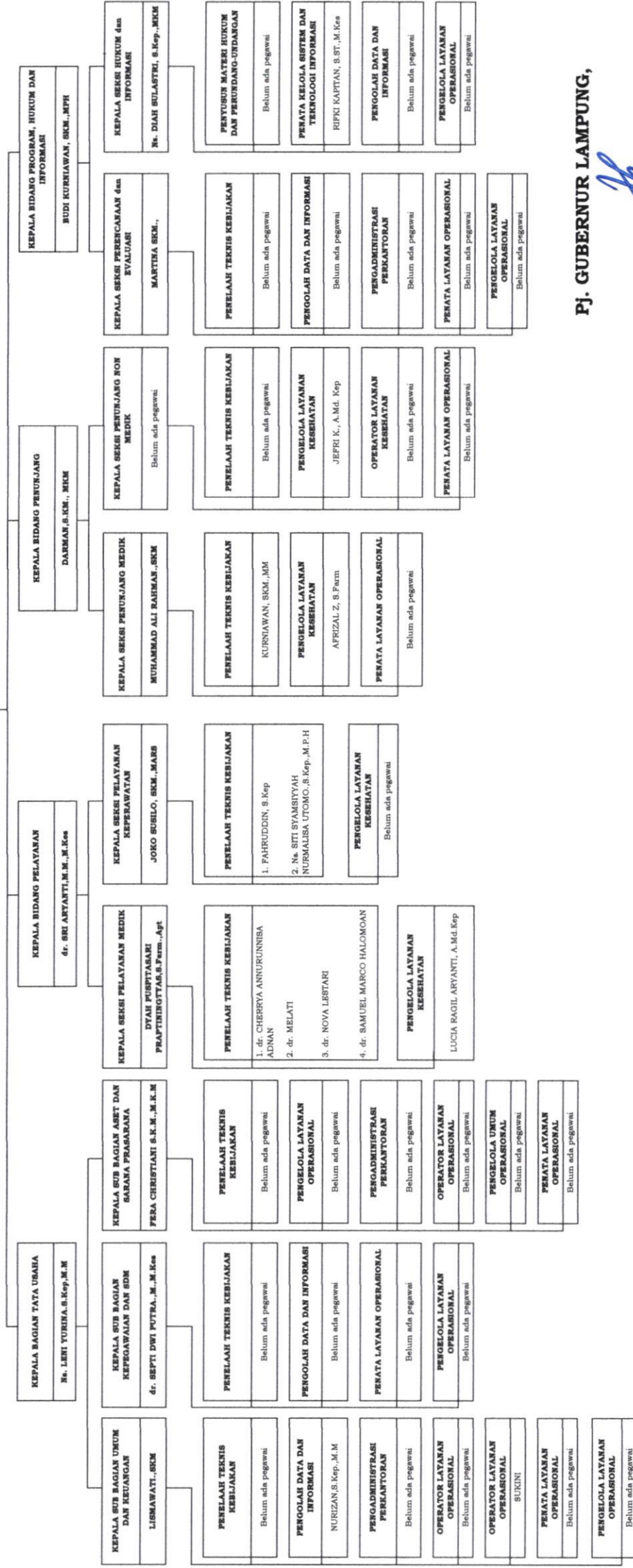
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**2. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
 RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

DIREKTUR RSUD BANDAR NEGARA HUSADA
 dr. DAJOHAN LUIS, M.Kes
 Pembina TK. I
 NIP. 19711022 200212 1 004



PJ. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

3. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG

DIREKTUR		RSUD BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG		Kls		B		K		S	
				13		1		1		0	
KEPALA BIDANG TATA USAHA											
Kls B K S											
11 1 1 0											
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 0 5 -5											
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI											
Kls B K S											
6 1 5 -4											
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN											
Kls B K S											
5 0 4 -4											
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
5 0 12 -12											
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
1 1 1 0											
PENATA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
7 0 5 -5											
PENGLOLA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
6 0 2 -2											
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN SDM											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 0 3 -3											
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI											
Kls B K S											
6 0 3 -3											
PENATA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
7 0 2 -2											
PENGLOLA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
6 0 1 -1											
KEPALA SUB BAGIAN ASET DAN SARANA PRASARANA											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 0 4 -4											
PENGLOLA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
6 0 4 -4											
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN											
Kls B K S											
5 0 6 -6											
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
5 0 4 -4											
PENGLOLA UMUM OPERASIONAL											
Kls B K S											
1 0 1 -1											
PENATA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
7 0 4 -4											
KEPALA BIDANG PELAYANAN											
Kls B K S											
11 1 1 0											
KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 4 5 -1											
PENGLOLA LAYANAN KESEHATAN											
Kls B K S											
6 1 2 -1											
KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 2 5 -3											
PENGLOLA LAYANAN KESEHATAN											
Kls B K S											
6 0 3 -3											
KEPALA BIDANG PENUNJANG											
Kls B K S											
11 1 1 0											
KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 1 5 -4											
PENGLOLA LAYANAN KESEHATAN											
Kls B K S											
6 1 3 -2											
PENATA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
7 0 2 -2											
KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK											
Kls B K S											
9 0 1 -1											
PENELAHAH TEKNIKIS KEBIJAKAN											
Kls B K S											
7 0 5 -5											
PENGLOLA LAYANAN KESEHATAN											
Kls B K S											
6 1 2 -1											
OPERATOR LAYANAN KESEHATAN											
Kls B K S											
5 0 4 -4											
KEPALA SEKSI HUKUM DAN INFORMASI											
Kls B K S											
9 1 1 0											
PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN											
Kls B K S											
7 0 6 -6											
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI											
Kls B K S											
7 1 5 -4											
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI											
Kls B K S											
6 0 4 -4											
PENGLOLA LAYANAN OPERASIONAL											
Kls B K S											
6 0 1 -1											

KELAS JABATAN		B		K		S	
KELAS 13		1		1		0	
KELAS 11		4		4		0	
KELAS 9		8		9		-1	
KELAS 7		8		67		-59	
KELAS 6		4		35		-31	
KELAS 5		0		34		-34	
KELAS 1		1		2		-1	
JUMLAH		26		152		-126	

Pj. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN